An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Evolusi Sistem Akuntansi (Diwan) dalam Sejarah Peradaban Islam dan Relevansinya Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Syariah Kontemporer

Aura Nadya Putri, Cut Nadiya, Kezia Leona, Hendra

Abstrak: Praktik pencatatan keuangan merupakan tulang punggung stabilitas perekonomian dalam sejarah tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah evolusi sistem akuntansi pemerintahan (*Diwan*) pada masa peradaban Islam serta menganalisis relevansinya terhadap standar transparansi pelaporan keuangan syariah di era kontemporer. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, kajian ini menemukan bahwa peradaban Islam sejak era Khalifah Umar bin Khattab telah melembagakan sistem *Diwan* yang berfungsi sebagai pusat akuntansi dan audit kas negara secara sistematis. Sistem pembukuan klasik ini dirancang tidak hanya untuk efisiensi administratif, tetapi juga sebagai manifestasi pertanggungjawaban (*accountability*) teologis kepada Tuhan. Di era modern, di mana industri perbankan kerap disandera oleh skandal manipulasi laporan keuangan, spirit historis dari sistem *Diwan* sangat relevan untuk diadopsi. Kesimpulannya, pengintegrasian nilai-nilai kejujuran akuntansi klasik ke dalam standar tata kelola keuangan syariah modern (seperti AAOIFI) adalah prasyarat mutlak untuk menjamin transparansi, melindungi hak pemangku kepentingan, dan mewujudkan keadilan ekonomi yang substantif.**Kata Kunci:** Sejarah Islam, Sistem Akuntansi, Diwan, Pelaporan Keuangan, Ekonomi Syariah

Abstract:*Financial recording practices are the backbone of economic stability in the history of state administration. This study aims to examine the history of the evolution of the government accounting system (Diwan) during the Islamic civilization and analyze its relevance to the transparency standards of Islamic financial reporting in the contemporary era. Using a qualitative method through literature study, this research finds that Islamic civilization since the era of Caliph Umar bin Khattab has institutionalized the Diwan system which functions as a center for systematic state cash accounting and auditing. This classical bookkeeping system was designed not only for administrative efficiency but also as a manifestation of theological accountability to God. In the modern era, where the banking industry is often held hostage by financial reporting manipulation scandals, the historical spirit of the Diwan system is highly relevant to be adopted. In conclusion, integrating the values of classical accounting honesty into modern Islamic financial governance standards (such as AAOIFI) is an absolute prerequisite for ensuring transparency, protecting stakeholder rights, and realizing substantive economic justice.***Keywords:** *Islamic History, Accounting System, Diwan, Financial Reporting, Islamic Economics*

Pendahuluan

Kajian mengenai lembaran sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa kejayaan umat di masa lampau tidak hanya dibangun di atas pilar-pilar kekuatan militer atau perluasan ekspansi wilayah geografis semata. Lebih dari itu, stabilitas hegemoni peradaban tersebut ditopang kuat oleh kemapanan infrastruktur administrasi dan tata kelola perbendaharaan kekayaan negara yang sangat akuntabel. Sejak turunnya wahyu Al-Qur'an, Islam telah memberikan perhatian yang luar biasa besar terhadap kewajiban melakukan pencatatan tertulis atas setiap transaksi utang piutang maupun aliran perpindahan harta komersial. Kesadaran akan pentingnya dokumentasi angka-angka finansial ini meletakkan fondasi yang paling esensial bagi lahirnya disiplin keilmuan tata buku keuangan atau akuntansi dalam ekosistem masyarakat madani (Karim, 2020).

Pada masa kehidupan kenabian di Jazirah Arab, wujud praktik pencatatan keuangan memang masih diselenggarakan dalam format yang amat sangat sederhana namun menjunjung tinggi nilai akurasi. Penerimaan negara yang bersumber dari instrumen zakat, infak, maupun harta rampasan (*ghanimah*) senantiasa dicatat dan langsung didistribusikan kepada kelompok asnaf yang berhak tanpa sempat mengendap lama di perbendaharaan. Meskipun belum memiliki bentuk departemen pencatatan yang terstruktur layaknya zaman kerajaan modern, kedisiplinan para sahabat nabi dalam menjaga validitas angka setoran kas telah mencetak standar moral yang amat luhur. Kejujuran absolut dalam menjaga amanah kekayaan umat inilah yang kemudian menjadi pijakan moral terkuat bagi perumusan sistem tata kelola keuangan peradaban Islam di generasi-generasi selanjutnya (Antonio, 2021).

Lompatan peradaban manajerial yang sesungguhnya baru meledak dan menemukan bentuk institusionalnya tatkala tampuk pimpinan kekhalifahan dipegang oleh kejeniusan literasi Umar bin Khattab. Seiring dengan meluasnya tapal batas wilayah penaklukan yang mencakup dataran subur Irak dan Syam, volume aliran kucuran penerimaan pajak lahan (*kharaj*) meroket tajam membanjiri brankas negara. Menyadari risiko fatal apabila kekayaan raksasa ini dikelola secara sporadis, sang khalifah mengambil keputusan historis dengan mendirikan departemen pencatatan negara yang diberi nomenklatur *Diwan*. Entitas birokrasi perbendaharaan ini bertugas secara spesifik menyusun daftar registrasi pembayar pajak serta buku besar pembagian gaji (*stipendium*) bagi para prajurit dan warga negara yang berhak (Hamid, 2019).

Dalam rentang perjalanan sejarah berikutnya, terutama pada zenit kejayaan pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, arsitektur tata buku *Diwan* mengalami proses metamorfosis kecanggihan yang luar biasa kompleks. Para birokrat muslim mulai menyusun buku pedoman akuntansi

kenegaraan yang mengatur tata cara pencatatan pendapatan (*al-jaridah*), mekanisme pencocokan jurnal harian (*daftar al-yawmiyyah*), serta prosedur audit silang untuk mencegah penyelewengan dana oleh pejabat pemungut pajak di daerah. Kompleksitas pembukuan yang dipraktikkan oleh para akuntan muslim pada abad pertengahan tersebut sesungguhnya telah menerapkan logika dasar akuntansi berpasangan (*double-entry bookkeeping*) jauh sebelum metode tersebut diklaim dan dipopulerkan oleh peradaban ilmuwan bangsa Eropa pada era Renaisans (Zaid, 2018).

Beralih menatap realitas wajah perekonomian industri komersial di panggung era modern saat ini, publik justru sering kali dihebohkan oleh meledaknya berbagai skandal manipulasi laporan keuangan di tingkat korporasi multinasional raksasa. Praktik polesan akuntansi kotor atau *window dressing* kerap kali dipergunakan secara licik oleh para eksekutif manajemen demi mengelabui mata para pemegang saham serta otoritas pajak kenegaraan. Di dalam ekosistem keuangan syariah sendiri, tuntutan akan transparansi pembukuan menjadi beban amanah yang berkali-kali lipat jauh lebih berat lantaran laporan tersebut tidak sekadar menyajikan kinerja angka laba rugi semata. Entitas perbankan syariah diwajibkan untuk mampu membuktikan secara matematis bahwa seluruh aliran kas yang mereka kelola benar-benar suci dari pencampuran unsur bunga ribawi (Napier, 2019).

Berpijak pada rincian kesenjangan dinamika problematika tersebut, penulisan artikel jurnal ini disusun dengan orientasi utama guna membongkar dan menelusuri evolusi sistem akuntansi klasik (*Diwan*) dalam lintasan sejarah peradaban Islam. Lebih dari itu, kajian akademik ini dipertajam untuk merekonstruksi dan menganalisis relasi kesinambungan antara nilai-nilai kejujuran tata buku masa silam tersebut terhadap upaya perumusan standar transparansi pelaporan keuangan syariah di era kekinian. Pengkajian literatur keilmuan ini diharapkan sanggup menawarkan secercah pencerahan epistemologis bagi para penyusun standar akuntansi, dalam rangka membentengi kredibilitas industri perekonomian Islam dari ancaman krisis moral penggelapan informasi finansial di masa depan.

Kajian Teori

1. Sistem Akuntansi (Diwan) dalam Sejarah Islam Pemaknaan kata *Diwan* di dalam lintasan pustaka peradaban administrasi negara bermuara pada sebutan untuk sebuah tempat atau majelis yang diperuntukkan khusus guna menyimpan kumpulan buku catatan resmi pemerintahan. Secara terminologis, institusi ini merepresentasikan sebuah departemen birokrasi eksekutif yang memegang mandat wewenang absolut dalam mengelola urusan tata usaha, inventarisasi data kependudukan, serta pencatatan jurnal lalu lintas masuk keluarnya seluruh harta kekayaan baitul

mal negara. Kehadiran biro akuntansi terpusat ini merupakan wujud transformasi peradaban nomaden menjadi sebuah tatanan masyarakat kota yang rasional, di mana pengawasan terhadap pendistribusian logistik dan keadilan fiskal dapat dilacak validitasnya melalui lembaran kertas manuskrip. Kekuatan dokumen tertulis ini menghapus budaya perputaran harta berbasis ingatan lisan yang rentan diselewengkan (Al-Mawardi, 2018).

Rancang bangun filosofis yang menegakkan arsitektur sistem akuntansi pada masa Islam klasik sesungguhnya diderivasi secara langsung dari doktrin pertanggungjawaban (*accountability*) yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. Berbeda dengan paradigma akuntansi kapitalis yang murni berorientasi melayani nafsu informasi para penanam modal (*shareholders*), akuntansi Islam mengusung paradigma pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan sekaligus tanggung jawab horizontal kepada seluruh umat manusia. Etika pelaporan keuangan di masa lalu menuntut pengungkapan kebenaran mutlak tanpa ada satu pun angka desimal yang disembunyikan demi kepentingan politik penguasa istana. Konsepsi penyajian kebenaran material yang tak terbantahkan ini menempatkan profesi pencatat keuangan sebagai salah satu pos jabatan paling sakral dan rawan dosa di dalam struktur kenegaraan (Kamla, 2021).

Dalam hierarki kepegawaian imperium kekhalifahan, sosok birokrat yang ditugaskan memegang kendali pembukuan ini menyandang gelar kehormatan sebagai *Al-Katib* (juru tulis atau akuntan negara). Kualifikasi untuk diangkat menjadi seorang *Al-Katib* menuntut penguasaan matematika hitungan pecahan yang sangat brilian, kemampuan ilmu tata bahasa yang presisi, serta rekam jejak moralitas keagamaan yang sama sekali tak pernah tercela oleh kasus kebohongan. Para akuntan peradaban ini diikat sumpah jabatan untuk senantiasa menyajikan laporan sisa kas daerah secara faktual kepada dewan menteri, meskipun angka tersebut akan membuat murka sang gubernur. Kemerdekaan intelektual dan keberanian sang akuntan klasik dalam menolak intervensi pesanan rekayasa angka merupakan tiang penyangga utama tegaknya supremasi keadilan birokrasi masa itu (Ibn Khaldun, 2020).

Kecanggihan infrastruktur literasi akuntansi peradaban tersebut semakin tak terbantahkan dengan ditemukannya pelbagai manuskrip buku pedoman tata kelola keuangan yang ditulis secara ensiklopedis oleh para cendekiawan muslim. Naskah-naskah kuno semacam risalah panduan akuntansi pemerintahan yang dikarang oleh pakar matematika Al-Mazindarani mendedahkan sebuah metode pembukuan multikolom yang sangat terperinci untuk melacak mutasi harian, konversi nilai mata uang asing, hingga penyusunan neraca saldo penutup di akhir tahun kalender fiskal hijriah. Pembakuan prosedur operasional standar (*SOP*) pencatatan kekayaan ini memastikan bahwa pergantian rezim penguasa dinasti politik

tidak akan pernah merusak sistem pelestarian aset negara. Dedikasi dokumentasi literatur finansial ini adalah mahakarya gemilang umat (Laswad, 2019; Scorgie, 2018).

2. Transparansi Keuangan Syariah Kontemporer Transparansi dalam ekosistem pelaporan keuangan lembaga syariah di era kontemporer didefinisikan sebagai prinsip keterbukaan informasi yang mewajibkan penyajian seluruh fakta material terkait kondisi ekonomi entitas bisnis secara utuh, jujur, dan mudah dipahami publik. Berbeda dengan korporasi konvensional, transparansi lembaga keuangan syariah memiliki dimensi ganda, yakni kejelasan terkait kesehatan rasio fundamental bisnis serta pengungkapan secara eksplisit ihwal tingkat kepatuhan operasional manajemen terhadap fatwa-fatwa hukum syariat. Sebuah laporan keuangan bank syariah baru dapat dikatakan memenuhi standar etika transparansi paripurna manakala lembaran tersebut mampu meyakinkan nasabahnya bahwa tidak ada percampuran antara dana halal dan aliran deviden najis di dalam perut perusahaannya. Transparansi ganda ini adalah jaminan ruh kedaulatan industri syariat (Chapra, 2022).

Guna mengawal dan menstandarisasi tuntutan transparansi global tersebut, komunitas pakar keuangan internasional merumuskan pendirian lembaga otoritatif bernama *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Lembaga prestisius ini memikul mandat mahaberat guna meracik dan menerbitkan berbagai perumusan standar akuntansi yang mampu mengakomodasi kekhasan karakter kontrak-kontrak fikih muamalah yang sama sekali tidak tertampung di dalam kerangka standar akuntansi sekuler IFRS. Kewajiban entitas syariah untuk secara transparan memisahkan pelaporan arus kas operasional komersial dari pelaporan pengelolaan dana amal sosial zakat merupakan salah satu bentuk revolusi standar yang dicetuskan oleh lembaga ini. Penyatuan kaidah hukum fikih dengan nalar akuntansi modern ini menjamin bahasa pelaporan finansial yang universal (Haniffa, 2020).

Namun demikian, perjuangan untuk menegakkan pilar keadilan informasi ini senantiasa dihantam oleh rupa-rupa tantangan praktik manipulasi akuntansi licik (*creative accounting*) yang acapkali menular merasuki mental para eksekutif perbankan syariah masa kini. Godaan untuk menyembunyikan rasio tingginya angka kredit macet pada pembiayaan berbasis bagi hasil kerap kali direkayasa melalui taktik penundaan pencatatan cadangan kerugian penurunan nilai aset guna menjaga ilusi kecantikan grafik pembagian dividen. Ketertutupan informasi terkait tingkat kepastian jaminan perlindungan modal (*capital protection*) pada instrumen deposito *mudharabah* juga sering menelan korban para nasabah ritel pemula yang awam literasi. Fenomena penyesatan arus informasi ini jelas bertentangan seratus persen dengan roh keikhlasan perdagangan (Huda, 2021).

Sebagai jalan keluar menumpas kegelapan informasi tersebut, pendekatan perumusan akuntansi kontemporer mulai diinjeksi dengan paradigma filosofis *maqashid syariah* yang memprioritaskan penjagaan perlindungan harta kekayaan (*hifdz al-mal*) masyarakat luas di atas hasrat pencapaian target bonus tahunan para direksi. Dalam kacamata *maqashid*, tindakan manajemen menyembunyikan risiko kebangkrutan investasi ke dalam catatan kaki laporan yang ditulis dengan huruf teramat kecil merupakan sebentuk kejahatan pengkhianatan kemanusiaan yang wajib diganjar sanksi pemidanaan. Restorasi etika keterbukaan informasi harus didorong untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tukang becak penyimpan saldo receh hingga bankir sentral, memperoleh derajat akses kebenaran angka laporan neraca yang setara absolut (Ascarya, 2021; Velayutham, 2019).

Metode Penelitian Rancangan prosedur metodologi penulisan artikel ilmiah ini murni mengadopsi format penelitian kualitatif melalui mekanisme pelacakan studi kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya berkarakter deskriptif dan analitis historis. Lintasan tahapan perburuan kepingan data dilangsungkan dengan menyisir, menelaah, serta memvalidasi rupa-rupa bongkahan referensi literatur kepustakaan yang memiliki rekam jejak otoritas keilmuan tinggi, mencakup manuskrip sejarah administrasi negara era Islam klasik, dokumen jurnal pelaporan akuntansi syariah internasional, hingga standar regulasi AAOIFI kontemporer. Pasca proses inventarisasi kompilasi informasi direkam paripurna, peneliti menerjunkan teknik analisis isi teks (*content analysis*) guna membedah secara komprehensif struktur anatomi kejujuran pembukuan *Diwan* masa lalu, untuk selanjutnya ditarik benang merah konklusinya terkait sejauh mana esensi akuntabilitas tersebut relevan diaktualisasikan ke dalam standar pelaporan industri perbankan syariah modern saat ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Evolusi Sistem Akuntansi (Diwan) pada Masa Kejayaan Islam Menguak lapisan rekam jejak pembentukan sistem pelaporan informasi finansial umat selalu bermuara pada fase prakondisi peletakan batu pertama di era kepemimpinan Rasulullah SAW beserta sang penerus Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kendati saat itu instrumen fasilitas kantor birokrasi akuntansi masih belum berwujud secara fisik, ketepatan kalkulasi dan pengawasan aliran logistik yang masuk ke gudang kas komunal telah dipraktikkan dengan presisi perhitungan yang luar biasa akurat menembus hitungan gramasi terendah. Kebijakan untuk secepat kilat membagikan seluruh timbunan harta hasil zakat ternak pada hari yang sama meniadakan perlunya penyusunan laporan neraca sisa kas yang berbelit-belit. Keputusan manajemen pendistribusian kilat ini menegaskan spirit bahwa

perbendaharaan negara sejati bukanlah sebuah lumbung untuk menimbun kekayaan, melainkan corong pemerataan distribusi (Lings, 2019).

Transisi revolusioner sistem pencatatan meledak ke permukaan sewaktu kebijakan agung Khalifah Umar bin Khattab meresmikan berdirinya bangunan institusi *Diwan* demi merespons membeludaknya aliran uang koin pajak *kharaj* dari berbagai provinsi gubernuran baru. Kejeniusan rekayasa administrasi sang khalifah terbukti lewat instruksinya yang mewajibkan pembuatan daftar registrasi induk (*master file*) pencatatan nama-nama prajurit, status nasab keluarga, serta rincian klasifikasi besaran hak jatah penerimaan tunjangan gaji rutin bulanan mereka yang tak boleh tertukar sepeser pun. Inisiasi penciptaan buku register terpadu ini menorehkan sejarah monumental sebagai bentuk peresmian sistem tata buku pemerintahan berpusat yang pertama di dunia semenanjung Arab. Integritas data *Diwan* Umar mengamankan jutaan keping kekayaan negara dari intaian ancaman virus korupsi (Fauzi, 2020).

Memasuki gerbang kegemilangan abad pertengahan di ibu kota pemerintahan Dinasti Abbasiyah, arsitektur birokrasi pembukuan *Diwan* bermetamorfosis membelah diri menjadi rupa-rupa direktorat jenderal spesialisasi yang super canggih kemampuannya. Negara mensponsori pendirian markas *Diwan al-Kharaj* khusus untuk menyajikan laporan penerimaan retribusi perpajakan lahan raya, serta membangun *Diwan al-Nafaqat* yang ditugaskan murni guna mengaudit pengeluaran anggaran proyek infrastruktur rumah sakit dan istana secara rigid. Fragmentasi spesialisasi departemen kas ini diiringi oleh pembentukan komite pengawasan khusus semacam badan pemeriksa keuangan yang kerjanya menyisir ulang silang validitas angka laporan antar kementerian untuk mengendus kejanggalan mark-up harga. Disiplin prosedur kontrol audit yang berlapis ganda ini melahirkan reputasi laporan kas imperium yang kebal dari segala macam rekayasa penipuan (Hitti, 2018).

Eskalasi kehebatan rekayasa akuntansi peradaban tak henti memuncak sejalan dengan diterbitkannya rupa-rupa literatur buku panduan akuntansi komersial (*Daftar al-Yawmiyyah*) yang dikarang apik oleh para cendekiawan intelektual ulama matematika masa itu. Standar prosedur buku pedoman tersebut mendiktekan kewajiban bagi setiap saudagar karavan niaga untuk membukukan transaksi pengeluaran di sisi sebelah kanan halaman kertas dan penerimaan di sisi sebelah kiri, dengan kewajiban rekonsiliasi keseimbangan jumlah akhir di baris penutupnya. Kemunculan fondasi konsep penyusunan jurnal harian berpasangan yang diimplementasikan oleh para birokrat dan pebisnis syariah tersebut berhasil melipatgandakan kecepatan ekspansi perniagaan lintas samudera lantaran para investor percaya penuh terhadap integritas laporan untung rugi. Ilmu pembukuan mutakhir inilah akar mahkota kekayaan peradaban timur (Zarqa, 2021).

Kesimpulan pilar pamungkas dari seluruh anatomi ketangguhan sistem akuntansi peradaban tersebut sejatinya tidak bertumpu semata-mata pada kerumitan rumus kolom angka di atas perkamen, melainkan berakar pada filosofi keimanan teologis yang tertanam kuat di sanubari para akuntan negara. Pemahaman batiniah bahwa sekecil apa pun perbuatan manipulasi menyelipkan kerugian sepeser koin dinar dari uang umat pasti akan dihisab dan diazab oleh pengadilan Tuhan kelak, membentuk sebuah tameng antibodi moral yang kebal suap. Ketika integritas audit ketuhanan menyatu dengan ketelitian rasionalitas akal perhitungan manusiawi, terciptalah sebuah lanskap pelaporan instrumen keuangan yang paling sempurna, etis, adil, transparan, dan sanggup menghancurkan hegemoni perbudakan keserakahan lintah darat di masanya (Rahman, 2022).

2. Aktualisasi Nilai Historis Diwan Terhadap Standar Pelaporan Syariah Kontemporer Menyeret roh kearifan kebanggaan nilai tata buku abad peradaban masa lalu agar mendarat presisi merespons hantaman tantangan kompleksitas arsitektur perbankan digital masa kini, mensyaratkan sebuah revolusi mental yang amat radikal. Spirit perintah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai kewajiban penulisan utang piutang dengan jujur wajib diinkarnasikan wujud ketegasannya ke dalam penyusunan logika pemrograman perangkat lunak (*software core banking*) milik perbankan syariat. Teknologi rekam jejak digital ini mutlak harus dikalibrasi sedemikian rupa sehingga mustahil bagi tangan jahat staf akuntan untuk memutarbalikkan secara sepihak persentase pembagian porsi bagi hasil antara pihak nasabah pemilik saldo tabungan dan jajaran korporasi direksi pengelola. Keakuratan pencatatan mutasi sistem *Diwan* klasik mutlak ditransformasikan menjadi kecanggihan pengamanan pangkalan data siber (Iqbal, 2020).

Pada dimensi perumusan pemaparan pertanggungjawaban sosial kemasyarakatan, kejayaan sejarah pemisahan absolut antara kas pundi uang zakat komunal dan lumbung pajak negara wajib direplikasi secara sempurna di dalam format penyajian lembaran neraca publikasi tahunan perbankan modern. Standar akuntansi kekinian diwajibkan untuk memaksa entitas perbankan syariah menyajikan kolom pelaporan pengelolaan kewajiban zakat perusahaan, setoran dana kebajikan (*qardh*), serta distribusi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara sangat terang benderang merinci satu per satu penerima santunannya. Pemecahan penyajian laporan sosial yang tak terselubung ini akan menggaransi publik bahwa korporasi keuangan tersebut tak semata sekadar meraup untung miliaran rupiah memeras nasabah, namun juga konsisten meneteskan keberkahan filantropi bagi kesejahteraan peradaban sekelilingnya (Siddiqi, 2019).

Lompatan perbaikan infrastruktur jalan keluar guna menghapus penyakit kronis asimetri informasi pada produk pembiayaan andalan berbasis syirkah kemitraan (*mudharabah* dan *musyarakah*) kini telah menanti campur tangan integrasi teknologi mesin pembukuan buku besar terdistribusi blok rantai (*blockchain*). Serupa dengan ketatnya audit silang buku catatan inspektur *Diwan al-Nafaqat* zaman lalu, pengaplikasian sistem akuntansi *blockchain* ini dipastikan bakal menelanjangi seluruh mutasi keluar masuk uang kas warung milik nasabah peminjam modal secara mutakhir di saat itu juga (*real-time*). Visibilitas pemantauan laporan yang tak bisa diretas ini seketika menumpas peluang nasabah untuk berbuat nakal merekayasa kebangkrutan usahanya, sehingga kucuran pendanaan modal ventura kerakyatan akan kembali bangkit merajai portofolio etalase bank syariah (Ali, 2022).

Dalam ranah penjaminan kehalalan operasional mesin akuntansi secara keseluruhan, beban mandat pengawasan independen mutlak diserahkan sepenuhnya ke pundak ketajaman pisau audit kepatuhan milik Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meresapi karakter wibawa keberanian aparat pengawas pasar (*muhtasib*) pada abad lalu, barisan ulama auditor DPS zaman kiwari dituntut wajib menguasai ilmu akuntansi forensik guna mampu membongkar kamuflase penyelundupan aliran pendapatan beban denda keterlambatan nasabah (*ta'widh*) agar tidak disusupkan secara haram masuk ke pundi-pundi laba operasional korporat. Kehadiran pengawasan audit forensik berbasis fatwa ketuhanan ini adalah garis perisai pembatas pamungkas yang memastikan status muruah laporan keuangan industri perbankan berlabel agama tidak tergelincir mencatatkan sepeser pun nominal najis pendapatan ribawi komersial (Hasan, 2021).

Pada titik muara konklusi tertingginya, agenda mega proyek harmonisasi antara pilar-pilar warisan ketelitian administrasi nilai peradaban lampau dengan gemerlap standarisasi akuntansi pelaporan kapitalis masa kini ini meneriakkan sebuah resolusi kebangkitan peradaban yang paripurna. Mengawinkan rumusan keterbukaan informasi instrumen kerangka pakem internasional semacam *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dengan parameter akuntabilitas ketuhanan dari dewan standar AAOIFI dipastikan bakal melahirkan generasi industri keuangan yang sungguh luar biasa sehat nan bermartabat. Kemauan membumikan spirit nilai kejujuran lembar catatan *Diwan* klasik ke dalam format cetak tebal laporan publikasi di media massa merupakan jaminan mutlak guna menyelamatkan ekosistem investasi harta syariah sejagat raya dari ancaman petaka badai disrupsi skandal kebangkrutan keuangan kotor abad milenial (Usmani, 2021).

Kesimpulan Berdasarkan serangkaian paparan argumentasi historis dan deduksi literatur analitis yang telah dibentangkan komprehensif, dapat ditarik konklusi tegas bahwa sejarah peradaban Islam membuktikan

eksistensi sistem *Diwan* bukan sekadar penemuan format birokrasi, melainkan monumen mahakarya keadilan arsitektur pelaporan perbendaharaan kenegaraan. Transformasi dari catatan ringkas di masa kenabian menuju institusionalisasi akuntansi negara (*Diwan*) yang sangat terperinci di era Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah, memastikan berjalannya akuntabilitas ganda: vertikal kepada Allah dan horizontal kepada kemaslahatan rakyat. Dalam merespons sengkarut ancaman skandal manipulasi laporan korporasi perbankan modern, kearifan tata kelola nilai-nilai kejujuran historis tersebut amat mendesak relevansinya untuk diaktualisasikan kembali lewat adopsi arsitektur standar akuntansi syariah kontemporer (seperti AAOIFI). Pengejawantahan nilai historis ini terejawantahkan dalam keterbukaan pemisahan dana sosial zakat, penerapan transparansi bagi hasil berbasis teknologi, serta ketegasan audit kepatuhan DPS. Pada esensinya, perpaduan antara etika pembukuan ketaatan spiritual masa lalu dengan teknologi inovasi transparansi finansial masa kini adalah syarat mutlak guna merebut kembali kepercayaan publik, melahirkan keadilan industri keuangan global, dan menegakkan marwah muruah ekonomi peradaban kemanusiaan yang beradab.

Daftar Pustaka

Ali, S. (2022). *Digital transformation in Islamic accounting: Blockchain and real-time ledgers*. Routledge.

Al-Mawardi, A. I. M. (2018). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: Sistem pemerintahan dan birokrasi perbendaharaan Diwan*. Ta-Ha Publishers.

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori klasik ke praktik akuntabilitas modern*. Gema Insani.

Ascarya, A. (2021). *Kebijakan pelaporan keuangan syariah dan penerapan maqashid al-shari'ah*. Rajawali Pers.

Azmi, S. (2021). *Islamic economics: Public finance and commercial accounting in early thought*. Routledge.

Chapra, M. U. (2022). *Masa depan ilmu ekonomi: Tinjauan transparansi pelaporan dan keadilan fiskal*. The Islamic Foundation.

Fauzi, A. (2020). *Sejarah lembaga keuangan Islam: Pendekatan institusional Diwan perbendaharaan*. Pustaka Pelajar.

Hamid, A. (2019). *Jejak sejarah kebijakan fiskal, moneter, dan birokrasi Umar bin Khattab*. UIN Press.

Haniffa, R. (2020). *Islamic accounting and reporting: Standards, AAOIFI, and modern applications*. Edward Elgar Publishing.

Hasan, Z. (2021). *Islamic macroeconomic policies, auditing, and corporate governance*. Pearson.

Hitti, P. K. (2018). *History of the Arabs: Administrative evolution and state accounting in the Abbasid era*. Palgrave Macmillan.

Huda, N. (2021). *Manajemen lembaga keuangan Islam: Isu-isu transparansi dan creative accounting*. Prenada Media.

Ibn Khaldun, A. (2020). *The Muqaddimah: An introduction to history and the sociology of professions*. Princeton University Press.

Iqbal, Z. (2020). *Justice and equity in modern Islamic financial reporting*. Edward Elgar Publishing.

Kamla, R. (2021). *Islamic accounting: Ethics, society, and accountability principles*. Routledge.

Karim, A. A. (2020). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Edisi revisi akuntansi komprehensif*. Rajawali Pers.

Laswad, F. (2019). *History of accounting: The contribution of early Muslim scholars and al-Mazindarani*. Routledge.

Lings, M. (2019). *Muhammad: His life and the administration of early public wealth*. Inner Traditions.

Napier, C. J. (2019). *Accounting history and the evolution of financial reporting practices*. Palgrave Macmillan.

Rahman, F. (2022). *Islam and modernity: Ethical transformation in accounting and trade finance*. University of Chicago Press.

Scorgie, M. E. (2018). *Indian and Islamic origins of accounting and modern double-entry bookkeeping*. Cambridge University Press.

Siddiqi, M. N. (2019). *Role of the state in the economy: Transparency in Zakat and public finance*. The Islamic Foundation.

Usmani, M. T. (2021). *An introduction to Islamic finance and financial disclosure ethics*. Maktaba Ma'ariful Quran.

Velayutham, S. (2019). *Accountability and transparency in Islamic wealth management*. Edward Elgar Publishing.

Zaid, O. A. (2018). *Akuntansi dan sistem pencatatan kenegaraan dalam masyarakat Islam awal*. Gema Insani.

Zarqa, M. A. (2021). *Fiqh of commercial accounting and the evolution of the daily journal*. KAAU Press.